

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan perusahaan nasional, pemerintah terus mendorong perusahaan-perusahaan keluarga dan badan usaha milik negara (BUMN) agar melantai di bursa dengan melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering (IPO)*) atau Penawaran Umum (*Go Public*). Penawaran umum dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada publik sehingga masyarakat dari berbagai lapisan membeli dan turut memegang saham atas perusahaan yang menerbitkan saham.

Dengan menjadi perusahaan terbuka (*Go Public*), pemerintah berharap bahwa perusahaan-perusahaan di negeri ini akan semakin kuat dan bertambah besar. Langkah ini juga akan memperkuat keterbukaan, akuntabilitas, dan efektivitas institusi. Bagi perusahaan swasta dan BUMN, langkah IPO juga bisa menjadi jalan untuk memberantas korupsi sehingga perusahaan lebih sehat, lebih transparan, dan terkontrol. Selain itu, dengan terdaftarnya di bursa saham utama merupakan sebuah *prestige* bagi perusahaan, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan analisis di perusahaan sekuritas. Hal ini akan menciptakan peluang-peluang baru dan pelanggan baru dalam bisnis perusahaan.

Namun, untuk menjadi perusahaan terbuka perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang telah disajikan oleh jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sebagaimana telah disebutkan dalam Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-49/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik.

Menurut FASB, terdapat dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan, yaitu: relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Sulitnya mengukur kedua karakteristik tersebut, maka dibutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan

tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan pada perusahaan tersebut.

Alim, Hapsari, & Purwanti (2007) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Semakin tinggi tingkat kualitas audit suatu KAP, maka akan semakin mudah sebuah KAP dalam memenangkan persaingan bisnis yang semakin kompetitif dan semakin mudah untuk mendapatkan klien. Dalam penelitian Riyatno (2007) menunjukkan bahwa telah banyak peneliti yang mencoba melihat atribut-atribut apa yang harus dimiliki auditor yang berkualitas baik dari sudut pandang auditor, pembuat laporan keuangan maupun pengguna laporan keuangan. Salah satu proksi yang lazim digunakan dalam penelitian mengenai pemilihan KAP adalah ukuran KAP.

Sebagai proksi dari pemilihan KAP, KAP dibedakan menjadi KAP besar (*Big Four accounting firms*) dan KAP kecil (*Non Big Four accounting firms*). Perbedaan tersebut dilakukan berdasarkan jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah rekan atau anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh dalam satu periode (Riyatno, 2007). DeFond dan Zhang (2014) mengungkapkan bahwa telah menjadi perdebatan bahwa KAP *Big Four* memiliki kualitas audit yang tinggi karena dianggap memiliki keahlian yang lebih baik. Pendapat tersebut juga didukung oleh Houghton dan Jubb (2003) yang menyatakan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Big Four* akan memiliki harga saham yang lebih tinggi karena memiliki tingkat integritas yang tinggi dan risiko yang lebih rendah.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Putri (2013) menunjukkan bahwa terdapat adanya hubungan positif antara ukuran KAP dan tingkat reputasi perusahaan, KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat.

Meskipun keputusan manajemen perusahaan sangatlah penting dalam melakukan pemilihan auditor *big four*. Namun, penelitian ini berfokus pada pengaruh struktur kepemilikan pada perusahaan terhadap pemilihan KAP di

Indonesia. Didukung dengan adanya fenomena saat ini yaitu pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat pada 3 tahun terakhir, hasil dari pembangunan infrastruktur yang mulai bergulir di Indonesia, dan perdagangan bebas di Kawasan Asia Tenggara atau biasa disebut dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Perkembangan merata di semua industri di Indonesia meningkatkan minat investasi tidak hanya para investor asing namun juga para penanam modal dalam negeri di perusahaan di Indonesia. Dengan mulai naiknya minat investasi di Indonesia hal tersebut akan meningkatkan persaingan perusahaan baik di tingkat *domestic*, regional, hingga Internasional. Dengan adanya fenomena ini, tentu saja akan memberikan dampak pada struktur kepemilikan di perusahaan.

Indonesia memiliki perbedaan karakteristik dari perusahaan-perusahaan di negara lain yaitu struktur perusahaan di Indonesia lebih terkonsentrasi, hal ini membuat pendiri dapat duduk sebagai dewan direksi maupun komisaris. Semakin tinggi tingkat konflik keagenan antara pemegang saham satu dengan lainnya, maka semakin tinggi permintaan untuk menggunakan KAP *big four* dan para pemegang saham dapat mempengaruhi pilihan auditor yang digunakan (Corten, Steijvers, & Lybaert, 2018). Para pihak internal tersebut antara lain *blockholders*, kepemilikan institusional, dan direktur independen.

Blockholders atau pemilik saham besar biasanya memiliki setidaknya 5% saham kepemilikan, sifatnya merata dan beraneka ragam di seluruh dunia dan memiliki dorongan serta kemampuan untuk mempengaruhi Perusahaan yang mereka investasikan (Hugo Wang, 2016). *Blockholders* dapat mengendalikan orang dengan setidaknya pemungutan suara 20%, sehingga dapat memperoleh kekuatan eksklusif dan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan perusahaan yang mereka investasikan serta mengamankan *private benefits* untuk diri mereka sendiri (Holderness, 2003). Dengan begitu, *blockholders* bisa mendorong manajemen perusahaan untuk menggunakan jasa KAP yang akan memberikan manfaat pribadi bagi mereka.

Dalam penelitian Barroso, Ali, Lesagne (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari *blockholders* terhadap pemilihan auditor. Menurut Barroso, Ali, Lesagne (2016) *blockholders* atau pemegang saham berperan dalam menentukan

jasa auditor mana yang digunakan sesuai dengan kepentingan dari pihak terkait dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk jasa audit.

Tarjo (2008) menyatakan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, bidang investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan institusional dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan (Rubin, 2005), sehingga berupaya untuk menjaga keselamatan investasi mereka di perusahaan lain. Oleh karena itu, kepemilikan institusional akan mendorong manajemen perusahaan untuk menggunakan jasa KAP *big four* agar kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi minim bias informasinya. Hal ini berguna bagi kepemilikan institusional dalam memberikan saran bagi manajemen perusahaan untuk keberlangsungan investasi mereka.

Alfraih (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap pemilihan KAP *big four*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk memilih KAP *big four*. Selain itu dalam penelitian Velury *et al.* (2003) mengatakan bahwa terdapat hubungan antara kemungkinan perusahaan mempekerjakan auditor *big four* dan tingkat kepemilikan institusional dalam struktur perusahaan. Adanya hubungan antara tipe auditor dan tingkat kepemilikan institusional dikarenakan adanya peran pemantauan investor institusi. Investor institusi lebih memiliki insentif ekonomi untuk memonitor perilaku manajemen sehingga investasi mereka dalam perusahaan meningkat.

Dan faktor eksternal terakhir ialah komisaris independen, dewan komisaris perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur PT (Perseroan Terbatas) dimana di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada direksi yang berasal dari luar perusahaan. Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan

komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya. Kondisi ini mengakibatkan komisaris independen akan mendorong penggunaan jasa KAP besar guna untuk melindungi hak para pemegang saham.

Dalam penelitian dari Forker (1992) dalam Ho dan Wong (2001) serta Nofsinger dan Mohr (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persentase dari dewan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan dari kualitas pengungkapan laporan keuangan dan mengurangi keuntungan dari informasi tersembunyi. Penelitian Liu dan Lu (2007) dan Cornett (2006) juga menemukan bahwa komisaris independen secara signifikan berpengaruh negatif terhadap praktek *earning management*. Jadi, komisaris independen berpengaruh terhadap meningkatnya pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Dengan meningkatnya pengawasan, maka perusahaan akan cenderung memilih auditor yang berkualitas tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *blockholders* berpengaruh terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik *Big Four*?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik *Big Four*?
- 3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik *Big Four*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menemukan bukti empiris tentang pengaruh *blockholders* terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik *Big Four*.

- 2) Menemukan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik *Big Four*.
- 3) Menemukan bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik *Big Four*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan mengenai pengaruh dari *blockholders*, kepemilikan institusional, serta komisaris independen terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik di masa yang akan datang. Bagi perusahaan yang sedang melakukan IPO, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh yang diberikan oleh *blockholders*, kepemilikan institusional, serta komisaris independen terhadap pemilihan Kantor Akuntan Publik *big four*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan yang saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Pada bagian 1 menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *outsiders* dapat berperan dalam menentukan pemilihan Kantor Akuntan Publik. Kontribusi dari penelitian serta sistematika penulisan juga dijelaskan dalam bab ini. Pada bagian 2 berisi landasan teori dan penelitian terdahulu. Landasan teori terdiri dari teori keagenan, auditing, kantor akuntan publik, *blockholders*, kepemilikan institusional, serta komisaris independen. Landasan teori dan penelitian sebelumnya dapat membentuk hipotesis dan kerangka penelitian yang dapat melandasi penelitian ini. Pada bagian 3 menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif yang berisi deskripsi variabel dependen yaitu pemilihan Kantor Akuntan Publik yang berkualitas. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *blockholders*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Serta variabel control yaitu ukuran perusahaan, dan leverage. Variabel-variabel tersebut akan diuji menggunakan model regresi logistik. Kemudian akan dijelaskan metode pengumpulan data dan teknis analisis data. Pada bagian 4 mendeskripsikan objek penelitian yaitu variabel dependen ialah pemilihan KAP yang berkualitas dan

variabel independen yaitu *blockholders*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen. Terdapat pula deskripsi daerah penelitian, identitas sampel, analisis data, interpretasi data berdasarkan alat dan teknik analisis yang digunakan. Pada bagian 5 merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang mengenai pemilihan KAP yang berkualitas ditinjau dari struktur kepemilikan pada perusahaan.